**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK
PELANGGARAN HAK CIPTA FILM MELALUI SITUS
STREAMING ILEGAL**

Ayuning Tyas Azis Putri¹, Abintoro Prakoso², Miftahul Munir³
Universitas Wiraraja
Email: antyasapp@gmail.com¹, abintoro@wiraraja.ac.id²,
miftahmunir7714@gmail.com³

Abstrak

Industri film merupakan salah satu bidang dimana kemajuan teknologi saat ini telah memberikan dampak positif terhadap dunia maya, namun kemajuan teknologi di industri film juga membawa dampak negatif. Dampak buruknya adalah orang-orang nekat menyebar film secara ilegal. Padahal film dilindungi undang-undang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta film yang disebarluaskan di website. Penelitian ini menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta meliputi: Pengumuman karya cipta, Pendistribusian Karya cipta, Penggandaan melalui website, Pembajakan, Penggunaan secara komersial.

Kata Kunci: Hak Cipta, Film, Website.

PENDAHULUAN

Dalam industri film, mengacu pada komponen produksi ekonomi suatu komunitas, di mana film ditonton dalam kaitannya dengan produk lain. Film juga termasuk dalam kategori komunikasi, yang merupakan komponen paling penting dari sistem apa pun yang digunakan orang dan organisasi untuk bertukar pesan. Dalam hal ini, akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri film, konsep, cita-cita, dan imajinasi semuanya digabungkan secara rumit untuk menciptakan dunia sinematografi yang berkaitan dengan pemahaman artistik. Film sebagai sebuah karya sinematografi adalah sebuah karya seni yang menceritakan suatu kisah secara visual dan diwujudkan sedemikian rupa.

Film yang termasuk karya sinematografi dilindungi hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali pengumuman itu dibuat perkembangan dunia perfilman di Indonesia.¹ Pengaturan mengenai Hak Cipta secara Internasional diketahui melalui Konvensi seperti *Berne Convention*, *Universal Copyright Convention* serta *The TRIPs Agreement*.⁸ *The TRIPs Agreement* tertulis di dalam perjanjian multilateral *GATT/WTO* yang diikuti oleh Indonesia, dimana tujuan dari perjanjian *The TRIPs Agreement* yaitu untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual sehingga mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.²

Industri film merupakan salah satu bidang dimana kemajuan teknologi saat ini telah memberikan dampak positif terhadap dunia maya. misalnya, situs resmi seperti Netflix, Iflix, Disney+Hotstar, dan WeTV menawarkan kemudahan akses ke situs nonton film online. Namun kemajuan teknologi di industri film juga membawa dampak negatif. Dampak buruknya adalah orang-orang nekat menyebar film secara ilegal. Padahal film dilindungi undang-undang hak cipta. Meski begitu, para penyebaran film secara illegal masih sering melakukan aksi penyebaran film meski sudah mendapat perlindungan hukum atas hak ciptanya. Di masa lalu, *Compact Disc* (CD) digunakan untuk film bajakan di industri film. CD-CD ini dijual secara terbuka dimana-mana, termasuk pasar dan tempat tujuan wisata. Namun, seiring berjalannya waktu dan pesatnya kemajuan teknologi, pembajakan film menjadi lebih umum di Internet. Pembajak film menyebarkan film curian mereka menggunakan situs web dan dapat diunduh dengan mudah.

Meskipun ketentuan hukum telah jelas, praktik pelanggaran hak cipta di internet, terutama terhadap film terus meningkat. Banyak situs atau platform yang mengunggah film secara ilegal, baik dalam bentuk streaming maupun unduhan. Misalnya, Kasus yang menyebabkan kerugian pada PT. Visinema Pictures. Pihak PT.Visinema Pictures mengetahui perbuatan Aditya Fernando Phasyah pada sekitar bulan April tahun 2020 melaporkan atas dugaan pembajakan film Keluarga Cemara kepada kepolisian dan Aditya Fernando Phasyah ditangkap oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari selasa tanggal 29 September 2020 di kawasan The Hok, Jambi Selatan, Kota Jambi . Aditya Fernando Phasyah telah membajak 3.000 judul film lokal dan impor sejak 2018. Pembajakan film Keluarga Cemara yang dilakukan oleh Aditya Fernando Phasyah dan Robbi Bhakti Pratama menyebarkan film bajakan melalui platform *website* <http://95.217.177.179/> atau DUNIAFILM21 dengan memperoleh keuntungan dari iklan yang ditayangkan serta pada aplikasi Telegram ditemukan film karya Visinema yang disebarluaskan dan terbukti bersalah melanggar Pasal 113 ayat (3), juncto Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

¹ Sebastian A Lendeng, Karel Yossi Umboh, dan Dientje Rumimpunu, "Tinjauan Hukum Hak Cipta dalam Bidang Karya Sinematografi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 2, 2021, hal. 169–179.

² Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, hal. 23

Hak Cipta juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Nomor: 762/Pid.B/2020/PN-Jmb tertanggal 21 April 2021 menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,00 kepada Aditya Fernando Phasyah. Manager Distribusi PT.Visinema Pictures selaku pelapor Putro Mas Gunawan memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jambi mendapatkan kerugian akibat pembajakan karena seharusnya pihak ketiga yang ingin menayangkan film milik Visinema harus izin dan kontrak dengan nilai antara 200.000 sampai 500.000 dolar AS.³ Namun film-film tersebut hingga kini masih ada dan masih bisa diputar Pada *website ilegal* lainnya. Hal ini menandakan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang salah satunya melindungi karya sinematografi dalam hal ini film belum secara menyeluruh melindungi film yang disebarluaskan tanpa izin pencipta pada *Website*.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta ini sangat beragam, mulai dari penggandaan tanpa izin, pengunggahan ulang ke *website* lain, distribusi melalui tautan unduhan, hingga penyediaan streaming film secara gratis. Penyebaran ilegal ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh kelompok yang terorganisir dan mengambil keuntungan ekonomi secara masif. Selain itu, keterbatasan pengawasan terhadap ruang digital serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor pendukung suburnya pelanggaran ini.

Maraknya pelanggaran hak cipta disebabkan kurang optimalnya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun kesadaran hukum hak cipta. Sebagaimana diketahui, penyadaran hukum dapat dilakukan baik melalui kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum. Disinyalir sosialisasi yang dilaksanakan terhadap masyarakat terkait dengan hak cipta belum dilakukan dengan menggunakan model pendekatan yang efektif. Sejalan dengan itu, aturan hak cipta yang diterapkan pun terkesan seporadis dan tidak menyentuh pada akar permasalahannya. Alhasil, kesadaran untuk menghargai ciptaan orang lain, salah satunya dalam hal perfilman yang disebarluaskan pada *website* pun belum optimal yang ada masyarakat semakin berani untuk melakukan pelanggaran hukum atas hak orang lain. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak cipta menjadi salah satu tantangan dalam memberantas praktik streaming film ilegal. Padahal, tindakan menonton film secara gratis di platform yang tidak berizin merupakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan para pembuat film dan industri kreatif secara keseluruhan. Perlu upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum agar industri film nasional dapat berkembang dengan sehat. Dalam hal ini, apabila kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan komersil maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang isinya “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Demikian pula, apabila kegiatan tersebut digunakan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut juga termasuk pelanggaran hak cipta jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Karena hal ini harusnya, Hukum dikelola sedemikian rupa dari berbagai aspek pendekatan termasuk dari segi psikologi, maka diskrepansi atau kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial, dapat ditanggulangi dengan jalan pembaruan hukum atau *law reform*. Penegakan dan penerapan hukum yang dilaksanakan secara lebih seksama sehingga rumusan kaedah atau norma hukum baik yang diangkat dari istilah sehari-hari atau pun yang

³ Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Nomor: 762/Pid.B/2020/PN-Jmb tertanggal 21 April 2021

dibuat istilah khusus merupakan citra kehidupan dalam masyarakat tentang keadilan.⁴

Hukum hak cipta Indonesia didasarkan pada hak kekayaan intelektual (HAKI). HKI merupakan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kreativitas manusia dan kemampuan mengomunikasikan gagasan kepada masyarakat dalam berbagai cara yang praktis dan menguntungkan. Peraturan hak kekayaan intelektual (HAKI), khususnya yang berkaitan dengan hak cipta, bukanlah hal baru di Indonesia. Berbagai modifikasi yang dilakukan terhadap undang-undang hak cipta menunjukkan hal ini. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC), hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak Cipta juga diatur dalam Pasal 25 dan 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik, yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah karya intelektual yang sudah didaftarkan sebagai hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri dan sejenisnya, dalam uraian penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, data elektronik serta dokumen elektronik yang disusun jadi suatu karya intelektual dalam wujud apapun wajib dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual sebab data elektronik ataupun dokumen elektronik mempunyai nilai ekonomi untuk penciptanya. Apabila tindakan dalam Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilihat dari sudut pandang hak cipta, tindakan Pasal 32 ayat 1 maupun Pasal 32 ayat 2 merupakan bentuk dari tindakan pengumuman dan perbanyakan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, tindakan pengumuman dan perbanyakan merupakan tindakan yang melanggar hukum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Maraknya praktik streaming film ilegal telah menimbulkan kerugian besar bagi industri perfilman. Dengan mengakses konten secara gratis melalui platform yang tidak berizin, penyebar dan penonton merampas hak para pembuat film untuk mendapatkan imbalan yang layak atas karya mereka. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan industri kreatif, tetapi juga merugikan negara akibat hilangnya potensi pendapatan pajak.

Selanjutnya khusus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 16 ayat (2) huruf f menyatakan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna pada frasa karena “sebab lain” tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang bentuk pelanggaran hak cipta pada penyebaran film melalui website. Dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Film Melalui Situs Streaming Ilegal”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji serta menganalisis penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dari berbagai aspek yang berkaitan dengan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta dalam film sebagai subjek hukum. Dengan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan proses analisisnya menggunakan interpretasi deduktif dan interpretasi sistematis.

⁴ Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika: Yogyakarta, hal. 9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk pelanggaran hak cipta bagi para pengguna situs *website* untuk streaming film secara ilegal bisa ditinjau melalui perspektif hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini yang menjadi salah satu fokus penelitian penulis. Sebagaimana penelitian kali ini dilakukan berkaitan dengan suatu pelanggaran di situs *website* ilegal oleh para penggunanya.

Berkaitan dengan film-film yang terdapat pada situs *website* ilegal biasanya diperoleh oleh pemilik saluran melalui sejumlah layanan streaming legal berlisensi atau tidak berlisensi, yang mengharuskan pengguna membayar biaya berlangganan sebelum mereka dapat menonton film. Masyarakat sudah familiar dengan layanan-layanan tersebut, mulai dari Disney Plus hingga WeTv, Netflix, Viu, dan Influx. Dan saat itulah pemilik akun *website* mengunduh film atau video orang lain (secara ilegal) dan mengunggahnya kembali ke *website* miliknya.

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak cipta yakni pada undang-undangnya hanya mengatur tentang hak eksklusif saja yang mana hak tersebut termasuk hak khusus untuk memberikan perlindungan bagi pencipta karya hingga hasil karya ciptaannya termasuk karya cipta film atau lebih dikenal dengan sebutan karya cipta sinematografi.⁵ Hak eksklusif dalam perlindungan hak cipta termasuk hak khusus yang secara otomatis pasti hadir sebagai hak yang menyertai para pencipta karya melalui prinsip deklaratif terhadap segala bentuk karya ciptaannya yang dilindungi melalui hukum positif Indonesia yakni peraturan perundang-undangan tentang hak cipta itu sendiri.

Analisa kasus yang penulis lakukan saat ini merupakan suatu kasus di lingkup pelanggaran hak cipta oleh suatu oknum atau pelaku yang berhasil mengunggah ulang sebuah film atau beberapa film dalam jumlah besar dengan penyajian secara full atau utuh (uncut) versi film tersebut pada situs *website* sebagaimana contoh nyatanya sudah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya. Bukan suatu bentuk kesulitan bagi oknum pelanggar tersebut melakukan penguploadan ulang film secara utuh. Tindakan oknum tersebut dalam mengunggah ulang film pada situs *website* sudah pasti termasuk pelanggaran karena terdapat beberapa hak orang lain mulai dari pihak pencipta karya hingga pelaku pertunjukan dari karya tersebut serta lembaga penyiaran yang dilukai atau dilanggar haknya hingga menimbulkan suatu kerugian. Dari sinilah bisa dilihat adanya beberapa pihak yang erat kaitannya dalam memperoleh suatu perlindungan hukum sesuai Undang-undang hak cipta.

Hal ini bisa diperjelas melalui beberapa hak ekonomi yang dipegang atau melekat pada diri pencipta karya ataupun pemegang karya cipta untuk bertindak dalam hal penerbitan karya ciptanya, pengadaan dengan berbagai macam bentuk yang memungkinkan baginya, pengaransemenan hingga pengadaptasiannya, pendistribusian hingga salinan dari karya ciptanya tersebut bahkan transformasi ciptaannya, pengumuman, pertunjukan, komunikasi hingga penyewaan dari suatu karya ciptaannya tersebut.⁶ Jadi dari sini bisa dipahami bahwa yang menjadi nilai komersial dalam suatu karya cipta adalah hak ekonomi itu sendiri dan siapapun pihak yang berkeinginan untuk melaksanakan hak ekonomi maka perolehan izin dari pencipta karya cipta itu mutlak atau wajib menyertai.

Sebagaimana fokus kasus pelanggaran hak cipta pada penelitian kali ini yang terjadi di *website* maka bisa ditinjau secara rinci untuk mempermudah mengetahui bentuk-bentuk kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran hak eksklusif pemegang hak cipta sesuai dengan

⁵ Rini, Hariyana, dan Imam Makhali, *Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram*. *Yustitiabelen*, vol 8 No.2, 2022, hal. 125

⁶ Susanti, 2017, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*, Setara Press : Malang, hal 84

perundang-undangan yang telah mengaturnya.⁷ Adapun bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut:

1. Pengumuman sebagaimana diatur Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan “*Pengumuman adalah pembacaan, pameran, penyiaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.*” Pengumuman karya cipta ini dapat melalui *website* sebagai media, tentunya dengan memenuhi beberapa unsur yakni:
 - a. Unsur Penyiaran yang mana penyiaran film ilegal melalui *website* pada Undang-undang hak Cipta Pasal 1 ayat 15 sudah menjelaskan terkait penyiaran itu sendiri. Hal ini menunjukkan betapa mudahnya mengumumkan atau menyiarkan film ilegal di *website* tanpa menggunakan kabel, yang tampaknya mudah dilakukan mengingat pesatnya kemajuan teknologi. Fakta bahwa streaming film sebagian besar pengguna *website* ilegal dapat menjadi bukti nyata adanya penayangan film ilegal pada situs *website* ilegal
 - b. Unsur ciptaan, film apa pun yang dibagikan atau diunggah ulang di situs *website* ilegal dilindungi oleh undang-undang hak cipta, terlepas dari apakah itu versi baru atau versi lama. Hal ini memang benar adanya, apalagi film adalah karya sinematografi yang dilindungi hak cipta dan harus mendapat perlindungan hukum
 - c. Penggunaan suatu cara atau alat salah satunya melalui internet dengan *website* misalnya, merupakan platform yang digunakan masyarakat dengan basis pengguna besar yang menggunakannya untuk mengakses apapun secara simple. bisa dikatakan sebagai alat untuk melakukan pengumuman karena lagi-lagi kemudahan dalam penyebaran dan pengaksesan berbagai macam informasi di dalamnya termasuk berkaitan dengan film ilegal di dalam
 - d. Unsur ciptaan yang terlihat, terbaca, atau terdengar oleh orang lain; film apa pun yang diunggah ulang di *website* dapat dengan mudah dilihat, dibaca, atau didengar oleh banyak pengguna *website* tersebut yang memiliki akses keseluruhan. Karena hal ini dapat dikatakan bahwa banyak orang telah mengakses saluran tersebut. Kemungkinan besar aktivitas ini juga akan diperluas dan diklasifikasikan sebagai pengumuman hak cipta
2. Pendistribusian Karya cipta sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Hak Cipta; dalam hal ini karya ciptanya adalah film, yang menjelaskan “*Pendistribusian adalah penjualan, penyebaran, dan/atau pengedaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.*” Konsep penyebarluasan atau pendistribusian dalam konteks ini adalah suatu proses atau tata cara melalui suatu tindakan menyebar sehingga menyebarkan. Namun, undang-undang hak cipta tidak menjelaskannya secara rinci atau jelas dalam keadaan khusus ini. Pendistribusian karya cipta ini juga bisa terjadi melalui *website* sebagai mediana tentunya dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pendistribusian yakni:
 - a. Unsur distribusi meliputi unsur penjualan yang menyebarkan karya berhak cipta berupa film di *website* secara ilegal. Yang nantinya oknum distributor tersebut menghasilkan uang dari beberapa iklan yang diterimanya, dan membagikan konten tersebut di situs.
 - b. Unsur penyebaran di *website* salah satunya kemampuan untuk mengirimkan video atau film berukuran besar. Hingga memungkinkan beberapa pemilik situs *website* untuk

⁷ Yunita Avindi, *Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk Streaming Film Ilegal Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Universitas Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2023, hal. 72

mengunggah film di sana karena ukuran file yang panjang dan ukuran file yang besar sehingga mudah dibagikan di website. Administrator situs website biasanya menggunakan sejumlah nama untuk situs website mereka yang cukup universal, sehingga memudahkan masyarakat untuk menemukan atau mencarinya. Contoh nama tersebut antara lain duniafilm21, Rebahinxxi, Layarlebar24, Layarkacaxxi dan lainnya atau mengetik di pencarian browser seperti “menonton film ipar adalah maut” hal itu langsung diarahkan pada website ilegal yang menyebarkan film tersebut

Selain Peraturan Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, terdapat undang-undang lain yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta melalui pendistribusian di era kemajuan digital. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang pada pokoknya disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*”

Sesuai pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, wajar jika persoalan tersebut berkaitan dengan streaming film ilegal di website yang melanggar hukum dan merupakan pelanggaran hak cipta, mengingat pelanggaran hak cipta film ini terjadi di era digital, pendistribusian film atau sinematografi yang dilindungi hak cipta didistribusikan menggunakan situs *website* secara ilegal.

3. Penggandaan sesuai dengan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan “*Penggandaan adalah proses pembuatan dan/atau suatu cara memperoleh penggandaan salinan dari suatu ciptaan melalui beberapa cara dan bentuk apapun secara permanen maupun sementara.*” Hak penggandaan itu sendiri mencakup hak untuk menyediakannya kepada publik dalam format apa pun, untuk dilihat kapan pun dan dari lokasi mana pun. Situs *website* ilegal merupakan salah satu cara yang berpotensi terjadinya penggandaan karya berhak cipta ini, asalkan memenuhi unsur, yang meliputi:

- a. Unsur menggandakan salah satunya melalui situs *website*. Jumlah salinannya bertambah ketika pemilik mengunggah ulang kontennya di situs atau aplikasi ilegal lainnya yang dapat diakses oleh banyak orang dengan berbagai jenis perangkat yang digunakan untuk mengakses hal tersebut juga masuk kategori penggandaan
- b. Unsur dalam bentuk apapun, artinya hukum akan selalu melindungi hak cipta suatu karya terlepas dari apakah admin atau pemilik situs *website* yang membuat salinan tersebut mengubah format karya tersebut.
- c. Tidak terbatas baik secara permanen maupun sementara, dimana hal tersebut dapat terjadi jika pemilik situs *website* menghapus yang pelaku upload ulang atau permanen terjadi jika pemilik situs mengunggah lagi film ke situs atau aplikasi ilegal lainnya seperti Telegram, yang akan disimpan secara otomatis untuk waktu yang lama atau permanen dan tidak akan pernah terhapus sehingga orang lain dapat menontonnya kapan pun mereka mau.

4. Pembajakan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 23 tentang Hak Cipta menjelaskan “*Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait yang tidak sah dan pendistribusian barang hasil dari penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.*” Pembajakan pada karya cipta dapat terjadi melalui *website* sebagai media berhak cipta dengan terpenuhi unsur-unsur, meliputi:

- a. Unsur tindakan pembajakan secara tidak sah suatu karya dalam bentuk film, atau mengambil karya hak cipta film dari sumber yang tidak sah, dianggap sebagai pembajakan. Karena tidak ada persetujuan sebelumnya dari pencipta atau pemegang hak cipta.

- b. Unsur secara tidak sah yang mana tanpa izin pemilik karya cipta dan pemegang karya cipta dengan seandainya pemilik akun menyebar film di situs webiste yang ia dapatkan melalui pengunduhan ilegal.
 - c. Unsur pendistribusian yang telah dibahas sebelumnya juga mencakup pendistribusian atau penyebaran film ilegal di *website* dengan melalui browser yang memenuhi salah satu persyaratan berupa pelanggaran pembajakan.
 - d. Unsur keuntungan finansial yang dapat dirasakan oleh pemilik situs *website* dan penggunanya adalah admin menghasilkan uang dari iklan yang dia dapatkan dan ditayangkan pada situs *websitenya*, dan pengguna sendiri memperoleh keuntungan karena dapat menonton atau streaming film di *website* tanpa batasan. Atau biaya. Mengingat banyaknya pengguna *website* yang melakukan perilaku ini, di sinilah kerugian finansial yang cukup signifikan terjadi baik bagi pemilik karya maupun pencipta karya.
5. Penggunaan secara komersial sesuai Pasal 1 ayat 24 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan “*Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.*” Pelanggaran dengan penggunaan secara komersial pada karya cipta ini juga bisa terjadi melalui *website* sebagai medianya tentunya dengan beberapa unsur yang telah terpenuhi yakni:
- a. Penggunaan situs *website* oleh pemilik perorangan terdapat unsur penggunaan komersial. Banyak dari pemilik ini juga menggunakan situs *website* mereka untuk menarik pengguna lain dari film yang mereka unggah ulang, sehingga meningkatkan basis pengguna dan potensi pendapatan mereka. Salah satu cara dia menghasilkan uang adalah dengan mempromosikan dan menyebarkan promosi atau iklan di salurannya, sehingga dapat dilihat oleh banyak pemirsa.
 - b. Unsur dari berbagai sumber mengacu pada fakta bahwa keuntungan diperoleh dari berbagai sumber karena iklan dan promosi yang dapat diperoleh berasal dari aplikasi lain. Beberapa contoh promosi tersebut antara lain untuk mendownload dan bergabung dengan aplikasi lain dengan menggunakan kode unik yang disediakan oleh pihak yang membagikan promosi, serta mempromosikan jual beli game, mendaftar judi online. Selain itu, mereka dapat menghasilkan uang dengan menjual situ *website* yang mereka miliki. Hal ini karena semakin banyak penonton yang terdapat pada situs *website*, semakin banyak pula uang yang dapat mereka asilkan, terutama jika mereka menjual akun tersebut karena harga jualnya akan otomatis tinggi.
 - c. Jadi secara hukum ekonominya telah terjadi suatu pelanggaran yang merugikan pihak pemilik film karena hak ciptanya dilanggar oleh oknum yang tak bertanggung jawab mengshare atau mengupload ulang film atau di *website*, dengan mengambil keuntungan atas tindakannya (penggunaan secara komersial) sebagaimana Pasal 1 butir 24 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tersebut. Kerugian ekonomi yang tentunya tak sedikit ditambah pula kerugian secara moral yang dirasakan oleh para pihak yang dilanggar haknya maka sudah selayaknya mereka menuntut ganti rugi.

Berdasarkan sejumlah penjelasan dan potensi bentuk pelanggaran hak cipta menyebarluaskan dapat dipahami sebagai tindakan yang meliputi penyiaran, penghamburan, atau pengalihan sesuatu kepada pihak lain, baik dalam skala kecil maupun besar. Hal ini terlihat erat kaitannya dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang membagikan atau menyebarkan video film berdurasi penuh di *website* yang tidak lain maksud oknum tersebut tindakannya semata-mata untuk kepentingan diri sendiri (keegoisan semata)

Sebagaimana Pada tahun 2020 , Pembajak film terjadi pada karya Visinema film Keluarga Cemara, film Keluarga cemara dilindungi sejak diumumkan yaitu tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan berakhirnya perlindungan pada tanggal 3 Januari 2069 sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan jangka waktu perlindungan selama 50 tahun dihitung sejak tanggal penciptaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mensyaratkan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta film keluarga cemara sudah dicatatkan pada pangkalan data kekayaan intelektual (DJKI) pada tanggal 20 Desember 2019, dengan pencatatan ini dapat memberikan seperti hak eksklusif dan memilih hak-hak seperti hak moral dan hak ekonomi. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut berbentuk hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana dibahas dalam Bab II, hak eksklusif ini diwujudkan dalam bentuk hak moral dan hak ekonomi. Pemegang hak cipta dapat memperoleh manfaat ekonomi atas suatu karya kreatif dengan memanfaatkan hak ekonominya. Sementara itu, hak etis untuk mengakui bahwa suatu karya seni merupakan perwujudan watak pencipta dan hubungan antar penciptanya dan keterkaitan antara pencipta dengan ciptaannya harus dihargai. Dengan kata lain, pencipta mempunyai hak kewenangan tunggal untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan otorisasi untuk melakukan hal tersebut, dengan tidak mnegurangi pada batasan apa pun yang diberlakukan oleh undang-undang dan peraturan terkait. Sebagaimana Menurut Pasal 31 sampai 34, pencipta dianggap sebagai pencipta. Sesuai Bab II Pasal 1 Angka 4 dan Bab IV yang diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39, pemegang hak cipta adalah pencipta yang mempunyai hak. Hak Cipta, pemilik sah hak yang diberikan oleh pencipta, atau pihak ketiga yang memperoleh hak tambahan dari pemilik sah hak tersebut. Sedangkan menurut Bab II, ciptaan adalah segala usaha kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang didasarkan pada inspirasi, bakat, kreativitas, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau keahlian dan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Hak Cipta tidak melindungi gagasan atau pemikiran yang belum terealisasi karena belum terealisasi. Dalam penelitian ini, PT. Visinema Pictures dan Angga Dwimas sebagai direktur utama PT. Visinema Pictures, merupakan pencipta dan pemegang hak cipta atas karya sinematografi film Keluarga Cemara. Film Keluarga Cemara telah di lakukan pencatatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor Hak Cipta EC00202006417. Film tersebut, diketahui telah disebarluaskan melalui *website* ilegal oleh Aditya (Terdakwa) berdasarkan penelitian yang dilakukan karena ditemukan pada *website* duniafilm21 milik Terdakwa. Terdakwa divonis 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan oleh Pengadilan Negeri Jambi. Pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3), junto Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau g, junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, pelanggaran dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- yang disertai dengan hukuman penjara satu bulan jika denda tidak dibayar. Pendistribusian film Keluarga cemara secara gratis dan lengkap di situs duniafilm21 oleh terdakwa merupakan pelanggaran. Hak komersial pencipta dan pemegang hak cipta dilanggar oleh tindakan terdakwa terhadap film Keluarga cemara. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdakwa tidak memiliki kewenangan atas hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta terutama Hak Ekonomi adalah hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptannya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan;
- i. Penyewaan Ciptaan.

Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran di atas tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu termasuk pelanggaran hak ekonomi yang dimiliki Pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar hukum 4 (empat) hak ekonomi seperti penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman ciptaan. Terdakwa melakukan penerbitan ciptaan tidak atas izin pemilik Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya yaitu Terdakwa melakukan penggandaan ciptaan merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu Salinan ciptaan atau lebih dengan cara dalam bentuk apapun baik secara permanen atau sementara dalam hal ini salinan film milik PT.Visinema Pictures. Pendistribusian ciptaan atau salinannya yaitu merupakan hak untuk melakukan penjualan, pengedaran, dan atau penyebaran ciptaan namun Terdakwa tidak memiliki hak tersebut dan menyebarluaskan melalui *website*. Pengumuman ciptaan dilakukan Terdakwa menggunakan alat elektronik yang membuat film milik PT.Visinema Pictures dapat dilihat oleh orang lain secara penuh dan gratis pada *website* yang membuat kerugian kepada pencipta atas ciptaannya. Akibat dari Tindakan Terdakwa tersebut mengakibatkan bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengalami kerugian materiil yang seharusnya dapat diterima sebagai keuntungan atas hak ciptaannya. Keuntungan tersebut berupa royalty sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Berdasarkan temuan penelitian, perbuatan terdakwa menghasilkan keuntungan, khususnya dari iklan. Pemilik iklan harus membayar sebelum iklan ditayangkan, dengan tarif paling rendah Rp 1.500.000 dan paling banyak Rp 3.500.000,- dalam jangka waktu 30 hari. Setelah membagi penghasilan secara merata, terdakwa menerima antara Rp 2.000.000 hingga Rp 3.000.000 setiap bulannya. Tarif tersebut akan di transfer oleh pemilik iklan ke Terdakwa bisa melalui rekening BCA, BNI atau Mandiri. Bahwa keuntungan yang didapatkan melalui iklan tersebut dibagi rata dengan Rhobi (kakaknya) yang masih buron karena berada di negara Kamboja bekerja sebagai SEO (jabatan yang terkait dengan *searchengine, developer, webmaster, web designer, social media* dan pemilik toko online).

Terdakwa dan saudaranya diuntungkan, namun pencipta dan pemegang hak cipta PT. Visinema Pictures dalam hal ini terkena dampak dari keuntungan yang diperoleh dari hal-hal di atas. Akibatnya pendapatan mereka berkurang karena tidak diberikan hak-hak yang menjadi haknya, yaitu hak-hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau prinsip ekonomi sebagaimana dijelaskan pada Bab II, asas-asas ekonomi. Kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari pemikiran dan usaha kreatif manusia yang bernilai dalam menunjang kehidupan manusia dan dikomunikasikan kepada masyarakat melalui berbagai cara. Bagi pemiliknya, kekayaan intelektual merupakan sumber kekayaan karena akan menghasilkan pendapatan misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* atau *technical fee*.

Menyikapi kerugian akibat pembajakan, PT. Visinema Pictures menyatakan pihak yang ingin mempertontonkan karyanya harus mendapatkan izin terlebih dahulu berupa

perjanjian film dengan pihak ketiga. Kesepakatan tersebut akan dipengaruhi oleh dua faktor: pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan karya tersebut, dan kedua, diberikan atau tidaknya hak eksklusif. Untuk nominal besarnya berbeda dari setiap perjanjian. Misalnya nominal akan berbeda-beda untuk televisi, Disney, Netflix, dan pihak lainnya. Kontrak dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah antara 200.000 dan 500.000 dolar AS, atau Rp 3.260.000.000 hingga Rp 8.150.000.000, dari hasil yang dikumpulkan peneliti. Pengaturan pemutaran film antara PT Visinema Pictures dan pihak ketiga dapat berlangsung antara beberapa hari hingga lima tahun. Misalnya, pihak ketiga mungkin dipamerkan di festival film selama beberapa hari. Adapun Terdakwa pada kasus ini tidak memiliki izin perjanjian film dengan PT. Visinema Pictures selaku pencipta dan pemegang hak film yang mereka sebar melalui website ilegal

Karena penyebaran sudah dilindungi undang-undang hak cipta, maka penyebaran termasuk dalam hak eksklusif. Dalam hal ini, pencipta tetap memegang kepemilikan hak dan secara alami mampu mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan distribusi dan penyebaran karya berhak cipta mereka sebagai pencipta melalui penyiaran dan lisensi dari lembaga penyiaran.⁸

Oleh karena itu, jika seseorang atau suatu entitas tidak memiliki kewenangan tunggal untuk menyebarkan suatu ciptaan, maka hal tersebut dapat dianggap melanggar hak cipta. Seseorang yang secara melawan hukum menyalin atau mengunduh suatu film dari situs web yang resmi kemudian menggunakan mengunggah ulang film tersebut untuk kepentingan pribadi, dengan tidak menghiraukan hak pencipta aslinya, merupakan contoh pelanggaran.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembajakan dalam arti peredaran atau penyebarluasan ilegal yang telah dibicarakan sebelumnya, yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, merupakan pelanggaran hak cipta film. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa mereka yang haknya dilanggar baik secara etika maupun ekonomi mempunyai hak eksklusif untuk menuntut atau menerima kompensasi yang adil dalam bentuk hak ekonomi. Pihak yang dirugikan yaitu pemilik salah satu karya berhak cipta berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemilik akun saluran yang melakukan pelanggaran, mengeksploitasi atau secara komersial memanfaatkan karya berhak cipta film orang lain tanpa izin (secara ilegal).

KESIMPULAN

Analisa kasus yang penulis lakukan saat ini merupakan suatu kasus di lingkup pelanggaran hak cipta oleh suatu oknum atau pelaku yang berhasil mengunggah ulang sebuah film atau beberapa film dalam jumlah besar dengan penyajian secara full atau utuh (uncut) versi film tersebut pada situs *website* sebagaimana contoh nyatanya sudah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya. Bukan suatu bentuk kesulitan bagi oknum pelanggar tersebut melakukan penguploadan ulang film secara utuh. Tindakan oknum tersebut dalam mengunggah ulang film pada situs *website* sudah pasti termasuk pelanggaran karena terdapat beberapa hak orang lain mulai dari pihak pencipta karya hingga pelaku pertunjukan dari karya tersebut serta lembaga penyiaran yang dilukai atau dilanggar haknya hingga menimbulkan suatu kerugian Adapun bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta pada penyebaran film melalui Website berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta meliputi: Pengumuman karya cipta, Pendistribusian Karya cipta, Penggandaan melalui website, Pembajakan, Penggunaan secara komersial.

⁸ Luh Mas Putri Pricillia dan I Made Subawa, *Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Penciptaan Di Media Sosial*, Kertha Semaya vol. 6, no. 11, Agustus, 2018, hal. 8

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Susanti, 2017, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*, Malang : Setara Press.

Jurnal

Sebastian A Lendeng, Karel Yossi Umboh, dan Dientje Rumimpunu, "Tinjauan Hukum Hak Cipta dalam Bidang Karya Sinematografi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* , Vol. 9, No. 2, 2021

Rini, Hariyana, dan Imam Makhali, "Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram", *Yustitiabelen*, Vol 8 No.2, 2022.

Luh Mas Putri Pricillia dan I Made Subawa, "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Penciptaan Di Media Sosial", *Kertha Semaya* vol. 6, no. 11, Agustus, 2018.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Penelitian Terdahulu

Yunita Avindi, 2023, "Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk Streaming Film Ilegal Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri KH. Achmad Siddiq, Jember

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Nomor: 762/Pid.B/2020/PN-Jmb tertanggal 21 April 2021